

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**RENCANA  
KERJA**

**RANCANGAN  
AKHIR**

**2025**



Jalan Raya Jabon No. 188 Mojoanyar  
Telp : (0321) – 325470  
Email : [bpbpmojomokertokab@gmail.com](mailto:bpbpmojomokertokab@gmail.com)  
Website : [bpbp.mojokertokab.go.id](http://bpbp.mojokertokab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu dana indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa, sehingga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>5</b>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>64</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>80</b>
5.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	80



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto juga menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan

cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

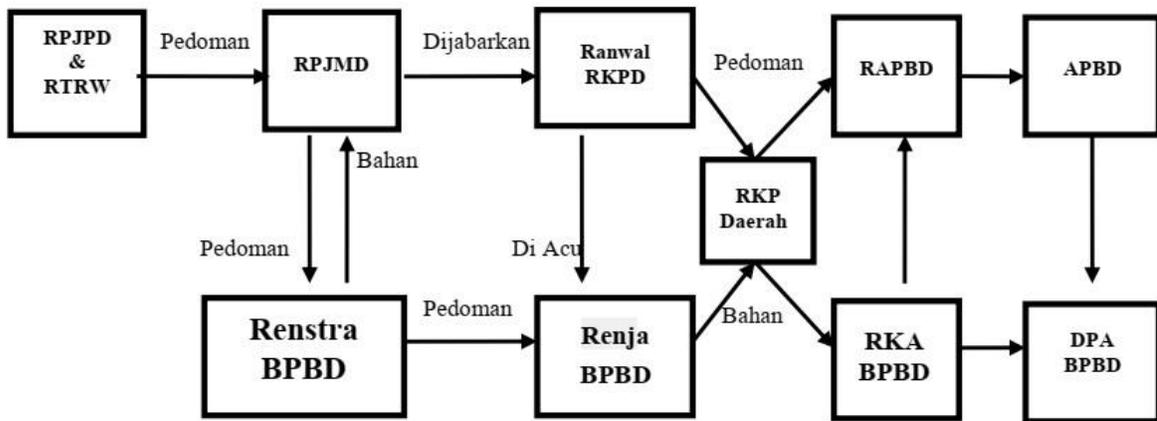
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mojokerto selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diamanatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan

pengecehan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang penanggulangan bencana, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2026.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dapat dikatakan sudah sangat tinggi dengan rata-rata pencapaian kinerja baik dan realisasi anggaran mencapai 97,02%, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Mojokerto**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		
						I		II		III		IV				
						7		12		13		14				15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)	0,825												
2		[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana(%)	70,00	2.233.167.770,00	0,00	797.493.280,00	0,00	269.824.881,00	0,00	422.338.632,00	0	692239139	0,00	2.181.895.932,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	118.000.000,00	0,00	1250000	0,00	4550000	0,00	6450000	0,00	105722500	0,00	117.972.500,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal(Dokumen)	1,00	105.000.000,00	0,00	1.250.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.722.500,00	1,00	104.972.500,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	75,00	13.000.000,00	0,00	0,00	75,00	4.550.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	2.000.000,00	75,00	13.000.000,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.143.124.140,00	0,00	461897930	0,00	194492750	0,00	122074370	0,00	334167800	0,00	1.112.632.850,00	

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana(Kawasan)	2,00	101.046.840,00	1,00	48.542.430,00	0,00	2.500.000,00	1,00	30.953.170,00	0,00	7.710.000,00	2,00	89.705.600,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya(Orang)	9,00	83.790.000,00	0,00	29.443.000,00	9,00	36.492.500,00	9,00	6.307.200,00	0,00	11.353.050,00	18,00	83.595.750,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi(Dokumen)	1,00	95.900.000,00	0,00	0,00	1,00	95.825.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	95.825.250,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan(Orang)	100,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410.000,00	300,00	35.102.800,00	300,00	46.512.800,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	8,00	436.387.300,00	4,00	356.912.500,00	2,00	7.695.000,00	0,00	31.704.000,00	2,00	32.467.700,00	8,00	428.779.200,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	175.000.000,00	3,00	27.000.000,00	3,00	51.980.000,00	3,00	41.700.000,00	3,00	54.000.000,00	12,00	174.680.000,00
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	473.648.445,00	0,00	81411000	0,00	23629170	0,00	181517050	0,00	184795000	0,00	471.352.220,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00	313.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149.480.000,00	0,00	163.134.000,00	1,00	312.614.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	50,00	90.223.445,00	50,00	56.891.500,00	0,00	10.805.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	13.541.000,00	50,00	89.287.500,00

3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	498.395.185,00	0,00	252934350	0,00	47152961	0,00	112297212	0,00	67553839	0,00	479.938.362,00
		Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00		0		0,00		0,00	0				
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	118.000.000,00	0,00	1250000	0,00	4550000	0,00	6450000	0,00	105722500	0,00	117.972.500,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal(Dokumen)	1,00	105.000.000,00	0,00	1.250.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.722.500,00	1,00	104.972.500,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	75,00	13.000.000,00	0,00	0,00	75,00	4.550.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	2.000.000,00	75,00	13.000.000,00
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.143.124.140,00	0,00	461897930	0,00	194492750	0,00	122074370	0,00	334167800	0,00	1.112.632.850,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana(Kawasan)	2,00	101.046.840,00	1,00	48.542.430,00	0,00	2.500.000,00	1,00	30.953.170,00	0,00	7.710.000,00	2,00	89.705.600,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya(Orang)	9,00	83.790.000,00	0,00	29.443.000,00	9,00	36.492.500,00	9,00	6.307.200,00	0,00	11.353.050,00	18,00	83.595.750,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi(Dokumen)	1,00	95.900.000,00	0,00	0,00	1,00	95.825.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	95.825.250,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan(Orang)	100,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410.000,00	300,00	35.102.800,00	300,00	46.512.800,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	8,00	436.387.300,00	4,00	356.912.500,00	2,00	7.695.000,00	0,00	31.704.000,00	2,00	32.467.700,00	8,00	428.779.200,00

		Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)												
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	175.000.000,00	3,00	27.000.000,00	3,00	51.980.000,00	3,00	41.700.000,00	3,00	54.000.000,00	12,00	174.680.000,00
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	473.648.445,00	0,00	81411000	0,00	23629170	0,00	181517050	0,00	184795000	0,00	471.352.220,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00	313.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149.480.000,00	0,00	163.134.000,00	1,00	312.614.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	50,00	90.223.445,00	50,00	56.891.500,00	0,00	10.805.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	13.541.000,00	50,00	89.287.500,00
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	498.395.185,00	0,00	252934350	0,00	47152961	0,00	112297212	0,00	67553839	0,00	479.938.362,00
			Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana(%)	40,00		0		0,00		0,00		0			
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	118.000.000,00	0,00	1250000	0,00	4550000	0,00	6450000	0,00	105722500	0,00	117.972.500,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal(Dokumen)	1,00	105.000.000,00	0,00	1.250.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.722.500,00	1,00	104.972.500,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,	75,00	13.000.000,00	0,00	0,00	75,00	4.550.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	2.000.000,00	75,00	13.000.000,00

		Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)												
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.143.124.140,00	0,00	461897930	0,00	194492750	0,00	122074370	0,00	334167800	0,00	1.112.632.850,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana(Kawasan)	2,00	101.046.840,00	1,00	48.542.430,00	0,00	2.500.000,00	1,00	30.953.170,00	0,00	7.710.000,00	2,00	89.705.600,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya(Orang)	9,00	83.790.000,00	0,00	29.443.000,00	9,00	36.492.500,00	9,00	6.307.200,00	0,00	11.353.050,00	18,00	83.595.750,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi(Dokumen)	1,00	95.900.000,00	0,00	0,00	1,00	95.825.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	95.825.250,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan(Orang)	100,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410.000,00	300,00	35.102.800,00	300,00	46.512.800,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	8,00	436.387.300,00	4,00	356.912.500,00	2,00	7.695.000,00	0,00	31.704.000,00	2,00	32.467.700,00	8,00	428.779.200,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	175.000.000,00	3,00	27.000.000,00	3,00	51.980.000,00	3,00	41.700.000,00	3,00	54.000.000,00	12,00	174.680.000,00
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	473.648.445,00	0,00	81411000	0,00	23629170	0,00	181517050	0,00	184795000	0,00	471.352.220,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	1,00	313.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149.480.000,00	0,00	163.134.000,00	1,00	312.614.000,00

			Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)												
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	50,00	90.223.445,00	50,00	56.891.500,00	0,00	10.805.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	13.541.000,00	50,00	89.287.500,00
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	498.395.185,00	0,00	252934350	0,00	47152961	0,00	112297212	0,00	67553839	0,00	479.938.362,00
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)(%)	57,14											
2		[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)(%)	100,00	829.542.900,00	0,00	121.857.764,00	0,00	211.517.610,00	0,00	201.453.254,00	0	293173522	0,00	828.002.150,00
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%)	100,00	829.542.900,00	0,00	121857764	0,00	211517610	0,00	201453254	0,00	293173522	0,00	828.002.150,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00	130.318.300,00	3,00	9.147.764,00	3,00	31.867.610,00	3,00	36.223.254,00	3,00	51.559.522,00	12,00	128.798.150,00
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran(%)	100,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
			Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00		0		0,00		0,00		0			

3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%)	100,00	829.542.900,00	0,00	121857764	0,00	211517610	0,00	201453254	0,00	293173522	0,00	828.002.150,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00	130.318.300,00	3,00	9.147.764,00	3,00	31.867.610,00	3,00	36.223.254,00	3,00	51.559.522,00	12,00	128.798.150,00
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran(%)	100,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)	80,00											
2		[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	84,70	5.747.287.000,00	0,00	1.291.765.622,00	0,00	1.604.672.232,00	0,00	1.241.201.259,00	0	1399778523	0,00	5.537.417.636,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah(%)	100,00	15.000.000,00	0,00	1200000	0,00	2300000	0,00	2900000	0,00	8600000	0,00	15.000.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3,00	7.500.000,00	1,00	900.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	0,00	4.400.000,00	3,00	7.500.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	3,00	7.500.000,00	1,00	300.000,00	1,00	1.200.000,00	1,00	1.800.000,00	0,00	4.200.000,00	3,00	7.500.000,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	95,00	4.942.787.000,00	0,00	1112330037	0,00	1374654272	0,00	1055293090	0,00	1220120374	0,00	4.762.397.773,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN(%)	71,70		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

3	[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	100,00	249.500.000,00	0,00	80714700	0,00	97148182	0,00	40266500	0,00	29400800	0,00	247.530.182,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	11.500.000,00	1,00	11.481.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11.481.450,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	4,00	35.000.000,00	0,00	0,00	4,00	33.680.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	4,00	33.995.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	45.000.000,00	1,00	8.173.500,00	0,00	13.898.000,00	0,00	6.607.500,00	0,00	16.010.500,00	1,00	44.689.500,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1,00	32.000.000,00	0,00	5.048.000,00	1,00	19.167.000,00	0,00	4.490.000,00	0,00	3.072.800,00	1,00	31.777.800,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)	12,00	7.000.000,00	3,00	1.350.000,00	3,00	1.350.000,00	3,00	0,00	3,00	4.108.000,00	12,00	6.808.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1,00	35.000.000,00	1,00	32.128.750,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34.818.750,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12,00	84.000.000,00	3,00	22.533.000,00	3,00	26.363.182,00	3,00	29.169.000,00	3,00	5.894.500,00	12,00	83.959.682,00
3	[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan)	12,00	300.000.000,00	0,00	60957847	0,00	67456531	0,00	75034353	0,00	77946510	0,00	281.395.241,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12,00	160.000.000,00	3,00	38.415.367,00	3,00	33.457.811,00	3,00	35.375.633,00	3,00	36.584.050,00	12,00	143.832.861,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12,00	140.000.000,00	3,00	22.542.480,00	3,00	33.998.720,00	3,00	39.658.720,00	3,00	41.362.460,00	12,00	137.562.380,00
3	[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(bulan)	12,00	240.000.000,00	0,00	36563038	0,00	63113247	0,00	67707316	0,00	63710839	0,00	231.094.440,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	29,00	200.000.000,00	5,00	20.564.838,00	11,00	52.353.247,00	7,00	65.902.316,00	6,00	52.645.839,00	29,00	191.466.240,00

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	1,00	12.500.000,00	0,00	11.358.200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1,00	12.288.200,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	10,00	27.500.000,00	1,00	4.640.000,00	4,00	10.760.000,00	2,00	1.805.000,00	3,00	10.135.000,00	10,00	27.340.000,00
	[Target Capaian Sub Kegiatan]													100.00 %	
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		komitmen dan kerja sama tim												
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		penyesuaian dengan keadaan darurat bencana												
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]	1. realisasi capaian kinerja pada sub kegiatan belum di isi; 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas	1. sub kegiatan yang tidak ada anggarannya agar di hapus karena mempengaruhi capaian kinerja OPD; 2. koordinsai dengan BPBD prov dan BNPB terkait kegiatan SPM												
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya ]	1. semua kegiatan yang dilaksanakan di tw 1- 4 tahun 2024 sudah sesuai target yang telah di tentukan, dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tahun 2025. 2. untuk pengisian faktor pendorong dan penghambat agar di isi sesuai per triwulan 3. kegiatan SPM agar lebih di perhatikan dalam penganggarannya. 4. Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan													

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun lalu(n-2) pada tabel T-C.29, dapat dijelaskan pencapaian sebagai berikut :

1. Indeks Kapasitas Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang ada di kabupaten/kota. Perhitungannya didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana yang didalamnya terdiri dari 13 sasaran dan 71 indikator. Pada Tahun 2024, Nilai IKD Kabupaten Mojokerto ditargetkan 0,825 akan tetapi realisasi capaian kinerja sesuai Berita Acara Pengukuran nilai IKD dengan BPBD Provinsi Jawa Timur diperoleh nilai IKD Kab. Mojokerto 0,79 sehingga capaian kinerja atas nilai IKD adalah sebesar 96% . Hal ini disebabkan :
  - a. Jenis ancaman bencana di Kabupaten Mojokerto masih tetap, yaitu banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung berapi. Intervensi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih belum dapat menghilangkan atau mengurangi jenis ancaman bencana tersebut.
  - b. Minimnya legalitas dokumen penanggulangan bencana yang ada di daerah yang disahkan

2. Indikator Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) diperoleh dengan membandingkan Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang telah terbentuk dengan Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto. Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) Prioritas yang harus dibentuk di Kab. Mojokerto sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang telah ditetapkan adalah 10 WMK

WMK yang harus ada sesuai RISPK adalah :

1. WMK PACET
2. WMK JATIREJO
3. WMK MOJOSARI
4. WMK NGORO
5. WMK SOOKO
6. WMK JETIS
7. WMK TROWULAN
8. WMK TRAWAS
9. WMK MOJOANYAR
10. WMK PUNGGING.

**Pada TA. 2024 WMK ditargetkan sebesar 20%, realisasi capaian kinerja sebesar 20% atau 100%.**

Hal ini disebabkan dari 10 WMK hanya terbangun 2 WMK yaitu di Mojoanyar dan Mojosari.

3. Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah diperoleh dari rilis nilai SAKIP BPBD oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. **Pada TA. 2024 ditargetkan sebesar 81,3, realisasi capaian kinerja sebesar 81,3 atau 100%.** Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 705/951/416-060/2024 tanggal 7 Mei 2024 terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanuti sebagai berikut :
  - a. Kedepannya dalam membuat target kinerja memperhatikan capaian target tahun sebelumnya
  - b. Melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk memastikan kembali atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan
  - c. Menyelaraskan indikator kinerja dengan target pada sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Menetapkan Indikator Kinerja Individu sampai level eselon IV dan staf
  - e. Melakukan revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 agar menginformasikan:
    - Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
    - Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya
    - Upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi
  - f. Segera menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya
  - g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian outcome kinerja perangkat daerah
4. Indikator realisasi anggaran perangkat daerah yang tercapai diperoleh dari membandingkan realisasi anggaran BPDB Kab. Mojokerto dengan total anggaran pada BPDB Kab. Mojokerto. **Pada TA. 2024 ditargetkan sebesar 94,5%, realisasi capaian kinerja sebesar 97,02% atau 103%.** Hal ini disebabkan dari total anggaran 8.809.997.670 terealisasi sebesar 8.547.315.718. hal ini disebabkan karena pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara intens tiap bulan sehingga apa yang direncanakan mendekati seperti yang direncanakan.
5. Indikator Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Rilis IP ASN dari rekapitulasi data ASN BPBD di My SAPK pada tahun evaluasi. **Pada TA. 2024 ditargetkan sebesar 82, realisasi capaian kinerja sebesar 80,80 atau 99%.** Hal ini karena dari 38 ASN yang ada di BPBD terdapat 7 ASN yang mendapat nilai kompetensi kurang dikarenakan ASN dimaksud mayoritas tenaga lapangan.

6. Indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan diperoleh dari jumlah inovasi yang dikomitmenkan dibuat atau dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto. Pada TA. 2024 ditargetkan sebesar 1 inovasi, realisasi capaian kinerja sebesar 1 inovasi . hal ini disebabkan pada tahun 2024 BPBD hanya dapat mengembangkan aplikasi SIMONA.

## **1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pemantapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**

(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mojokerto**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET					REALISASI			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kerentanan	-	-	6,94	6,25	-	-	-	6,96	-		-	-	Mulai TA. 2022 Indeks Kerentanan tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD
2	Indeks Kapasitas	-	-	11,3	12	-	-	-	11,67	-		-	-	Mulai TA. 2022 Indeks Kapasitas tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD
3	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	-	-	-	0,788	0,825	0,806	0,806	-	0,76	0,79	0,788	0,8	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) mulai digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022
4	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	20%	57,16%	20,00%	20,00%	-	20%	20%	20,00%	20,00%	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022
5	Persentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018



13	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
14	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
15	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
16	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
17	Persentase layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	58,86%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018
18	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018

### **1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Belum tersedianya rencana kontinjensi per jenis bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
5. Pos pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Mojokerto saat ini hanya berada di 2 lokasi (Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar) yang harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas 692,15 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, minimal ada 10 (tujuh) pos pemadam kebakaran yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota.

6. Armada pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi (hanya memiliki 7 armada). Dari jumlah tersebut 2 unit diantaranya tidak dapat berfungsi. Jumlah armada yang dibutuhkan menyesuaikan dengan jumlah pos pemadam kebakaran / WMK yang ada. Sehingga jika seharusnya terdapat 10 pos pemadam kebakaran / WMK maka jumlah armada yang harus dimiliki sebanyak 20 unit.
7. Jumlah personil pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum sesuai standar, baik dari jumlah maupun kompetensi. Saat ini BPBD Kabupaten Mojokerto hanya memiliki 44 personil dan hanya 5 personil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemadam Tingkat 1. Sedangkan jumlah personil pemadam kebakaran yang harus dimiliki adalah sebanyak 15 orang pada setiap pos.
8. Peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi.

Sedangkan isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sistem peringatan dini bencana / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
2. Pemenuhan layanan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap (*response time*) 15 menit.
3. Sertifikasi keahlian/kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Penanganan infrastruktur rusak karena bencana yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tapi berdampak pada masyarakat Kabupaten Mojokerto.
5. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

#### **1.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,90		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,90		
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Mojokerto	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	20%		Program Penanggulangan Bencana	Kab. Mojokerto	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	20%		
			Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%				Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%		

			Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%				Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%		
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Mojokerto	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Mojokerto	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%		
			Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%				Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL</b>					

### 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 5 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan jurnalis. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, akademisi, jurnalis, serta pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojoekrto yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 :

**Tabel 2.5**  
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025**  
**Kabupaten Mojokerto**

#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk **“Membangun Kembali Lebih Baik“** dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan Desa hingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pasca bencana.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi proaktif, dan dari penanganan darurat menjadi pencegahan, serta senantiasa mendukung peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu adalah 2021 – 2026 adalah :

#### 1. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Indikator tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

##### 1. Indeks Resiko Bencana dengan target kinerja pada TA. 2025 sebesar **105,61**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

#### 1. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

##### 1. Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Dengan target kinerja pada TA. 2025 sebesar 20%.

##### 2. Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Dengan target kinerja pada TA. 2025 sebesar 0,825.

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NO.REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	<b>01.05.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
2	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
7	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
10	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
12	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
13	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
18	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material
19	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
21	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
22	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
26	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36	<b>01.05.03</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>
37	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
38	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
39	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
40	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
41	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
42	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
43	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi
44	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
45	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
46	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
47	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota

48	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
49	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
50	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
51	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
52	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
53	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
54	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
55	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
56	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
57	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
58	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
59	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
60	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
61	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
62	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
63	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
64	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
65	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
66	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
67	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
68	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
69	1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
70	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
71	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
72	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
73	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
74	<b>01.05.04</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>
75	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
76	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
77	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
78	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
79	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
80	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
81	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
82	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
83	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
84	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
85	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

86	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
87	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
88	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
89	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
90	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
91	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
92	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
93	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
94	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
95	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
96	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
97	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
98	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
99	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
100	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
101	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
102	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

**Tabel 3.1**  
**(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun**  
**Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2026**  
**Kabupaten Mojokerto**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	8	9	11	15	16
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			10.900.000.000,00			26.449.589.924,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.900.000.000,00			26.449.589.924,00
1 05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.900.000.000,00			26.449.589.924,00
1 05 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10 (A) nilai	6.274.404.000,00		-	12.393.064.924,00
1 05 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 %	15.000.000,00		-	33.500.000,00
1 05 01 2.01 00 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13.500.000,00
1 05 01 2.01 00 07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
1 05 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95 %	5.472.404.000,00		-	7.884.956.964,00
1 05 01 2.02 00 01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5.472.404.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.509.482.823,00
1 05 01 2.02 00 02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00	-		375.474.141,00
1 05 01 2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN	71,70 %	0,00		-	150.000.000,00
1 05 01 2.05 00 02					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	0,00	-		75.000.000,00
1 05 01 2.05 00 10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	0,00	-		75.000.000,00
1 05 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	249.500.000,00		-	763.607.960,00
1 05 01 2.06 00 01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.500.000,00
1 05 01 2.06 00 02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
1	05	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	-		13.107.960,00
1	05	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
1	05	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
1	05	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
1	05	01	2.06	00 07	Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110.000.000,00
1	05	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
1	05	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	-		25.000.000,00
1	05	01	2.06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	-		25.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0,00		-	2.220.000.000,00
1	05	01	2.07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	-		90.000.000,00
1	05	01	2.07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	-		90.000.000,00
1	05	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	-		40.000.000,00
1	05	01	2.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	-		1.800.000.000,00





1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	502.500.000,00		-	1.405.525.000,00
1	05	03	2.03	00 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
1	05	03	2.03	00 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	157.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		295.525.000,00
1	05	03	2.03	00 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	70.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		265.000.000,00
1	05	03	2.03	00 07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	0,00	-		50.000.000,00
1	05	03	2.03	00 08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						
						Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 Orang	150.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
1	05	03	2.03	00 09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		230.000.000,00
1	05	03	2.03	00 10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit						
						Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0,00	-		100.000.000,00
1	05	03	2.03	00 12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		265.000.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 kegiatan	600.000.000,00		-	1.550.000.000,00
1	05	03	2.04	00 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0,00	-		50.000.000,00
1	05	03	2.04	00 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0,00	-		50.000.000,00
1	05	03	2.04	00 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0,00	-		100.000.000,00

1	05	03	2.04	00 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	0,00	-		100.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	8 Orang	0,00	-		150.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	115.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	230.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		550.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	5 Lembaga	0,00	-		50.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota						
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	205.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	
1	05	03	2.04	00 16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	-		100.000.000,00	
1	05	04			PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	100,00 %	1.998.096.000,00	-		8.410.000.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	1.813.096.000,00	-		6.715.000.000,00



						Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	0,00	-		100.000.000,00
1	05	04	2.01	0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran						
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	1 Dokumen	0,00	-		50.000.000,00	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	838.096.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.575.000.000,00	
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	0,00	-		50.000.000,00	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga						
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	10 Keluarga	0,00	-		100.000.000,00	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	25.000.000,00	-	60.000.000,00	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00	-		30.000.000,00	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	60.000.000,00	-	135.000.000,00	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	0,00	-		50.000.000,00	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	60.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana						
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1 Dokumen	0,00	-		50.000.000,00	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	100.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	0,00	-		100.000.000,00	
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						

					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	-		100.000.000,00
1	05	04	2.05	00 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	0,00	-		50.000.000,00
1	05	04	2.05	00 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	4 Unit	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.250.000.000,00
<b>J U M L A H</b>							<b>10.900.000.000,00</b>			<b>26.449.589.924,00</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun**  
**Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Mojokerto**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana					
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	APBD KAB	APBD PROV		USULAN APBN		
2					3	4	8	9	11	SKPD	PAGU	KL	RP	D/TB/ DAK
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			10.900.000.000,00						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.900.000.000,00						
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.900.000.000,00						
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10 (A) nilai	6.274.404.000,00						
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100 %	15.000.000,00						
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95 %	5.472.404.000,00						
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5.472.404.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00	-					
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN	71,70 %	0,00						
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	0,00	-					
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	0,00	-					
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	249.500.000,00						
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.500.000,00	DANA ALOKASI					



1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	-						
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	260.000.000,00						
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	-						
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	277.500.000,00						
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	200.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	27.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	100,00 % 50,00 % 70,00 %	2.627.500.000,00						
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	100 %	155.000.000,00						
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota									











1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00	-							
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	60.000.000,00								
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat											
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	0,00	-								
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran											
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	60.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)							
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana											
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	1 Dokumen	0,00	-								
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	100.000.000,00								
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia											
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	0,00	-								
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi											
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	-								
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi											
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	0,00	-								
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi											
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	4 Unit	100.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)							
<b>J U M L A H</b>								<b>10.900.000.000,00</b>								

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto.
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto.
3. Target capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan seperlunya, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO



**Drs. YO'IE AERIDA SOESETYO D.IATL.SH.M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP: 19680207 198809 1 001